

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El-Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prensky, M., ... Santa, U. F. De. (2016). PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN1 Oleh: Ryan A. Turangan2 ABSTRAK. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689–1699.

<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ah>

<http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5C>

[http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%](http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa)

[5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa](https://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa)

Asy'ari, H. (2015). akan dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi berjudul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN MENGULANGSEWAKAN BANGUNAN KEPADA PIHAK KETIGA DARI PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN DENGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUHPERDA. *Nhk技研*, 151(september 2016), 10–17.

<https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>

- Cyntia ROSA DEWI. (2002). “AKIBAT HUKUM PEMBERHENTIAN DOSEN STIE EKUITAS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.” In ウィルス (Vol. 52, Issue 1).
- Date, R., & Search, Q. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PT Margahayu Land Di Kota Bandung Yang Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dalam Meningkatkan Pemenuhan Hak Pekerja. 1–154.
- Fiddarain, K., Fadhilah, N., & Hasibuan, A. (2024). Analisis Komparatif Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero). 01(04), 465–474.
- Josviranto, M. (2022). Tinjauan Yuridis Perusahaan dalam Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 7(1), 165. <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i1.895>
- Nasution, M. S., Suhaidi, & Marzuki. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 415–431.
- Prasetya, Y. A., & Adnyana, I. G. N. (2022). Tuntutan Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak melalui Pengadilan Hubungan Industrial atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan No: 219/Pdt Sus-Phi/2017/PN Mdn). *Bhirawa Law Journal*, 3(2), 145–154. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.8935>

- Sari, I. (2020). Penetapan Hak-Hak Pekerja Setelah Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Mitra Manajemen*, 25–36. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/551/517>
- Setiowati, R. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Pensiun Dini (Studi Kasus di Kantor Pusat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung Tahun. *Openlibrary.Telkomuniversity.Ac.Id*, 1(3), 66–75. http://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/65593/jurnal_epr/oc/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengambilan-keputusan-pensiun-dini-studi-kasus-di-kantor-pusat-pt-kereta-api-indonesia-persero-bandung-tahun-2012-2013-.pdf
- Sugiarto. (2016). "TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PT KERETA API INDONESIA TERHADAP KARYAWAN DI USIA PENSIUN (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No 428/K.pdt.sus- PHI/2021)". 4(1), 1–23.
- (Almeida et al., 2016; Asy'ari, 2015; Cyntia ROSA DEWI, 2002; Date & Search, 2019; Fiddarain et al., 2024; Josviranto, 2022; Nasution et al., 2021; Prasetya & Adnyana, 2022; Sari, 2020; Setiowati, 2014; Sugiarto, Agus Wijaya*, Solechan, S. (2022). *ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN SETELAH PENGESAHAN UNDANG-*

UNDANG CIPTA KERJA. 11(13).

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Andewi, K. (2019). Pertumbuhan Badan Usaha di Indonesia. *Alprin*, 2.

Ansari, M. I. (2018). Badan Usaha Milik Negara Dan Kewajiban Pelayanan Umum Pada Sektor Pos. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 8(1), 3. <https://doi.org/10.17933/jppi.2018.080101>

Ansyahrach. (n.d.). *Sejarah PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)*. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/702/jbptunikompp-gdl-ansyahrach-35058-1-unikom_a-i.pdf

Anwar, M. Z. (2020). *Kesejahteraan. September*, 11–46.

AREA, U. M. (n.d.). *Hukum Ketenagakerjaan*. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/744/5/111803006_file5.pdf

Ari Hernawan. (2016). Keberadaan Uang Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum Di Perusahaan Yang Sudah Menyelenggarakan Jaminan Program Jaminan Pensiun. *Kertha Patrika*, 38(1), 7.

Asti, E. G. I., Nasution, A., Hukum, I., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2023). *PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PESANGON OLEH PTPN IV KEBUN AJAMU PANAI HULU SUMATRERA UTARA KEPADA PEKERJA YANG TELAH MEMASUKI USIA PENSIUN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA*. 30–31.

- Buruh, A. (2021). *KEPASTIAN HUKUM MANFAAT Pensiun Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster IV Dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015*. 02(13), 254–262.
- Dede Agus. (2019). *Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. 4(13), 8–18.
- Dharma Pura, I. P. W., & Budiana, I. N. (2020). Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 34. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.238>
- DPR RI. (n.d.). *Berkas DPR RI*. 4, 1. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-240.pdf>
- Dr. Nuradi, S. H. M. H., & Edi Rohaedi, S. H. M. H. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Perlindungan Pekerja Alih Daya* (Issue 55).
- Gerven, D. Van. (2019). *Naamloze Vennootschap*. 366, 8.
- Indah Sari. (2020). Penetapan Hak-Hak Pekerja Setelah Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Mitra Manajemen*, 28. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/551/517>

- Jaya, U. A. (n.d.). *BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kehadiran. 1874, 72–81.* <https://e-journal.uajy.ac.id/1951/3/2KOM03685.pdf>
- Kasmir, Jakfar, S. (2018). *Pengertian perseroan terbatas.* 25–43. [http://repository.uin-suska.ac.id/7057/4/BAB III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/7057/4/BAB%20III.pdf)
- Mashudi. (2017). *ANALISIS YURIDIS PASAL 167 AYAT (1) MENGENAI USIA DAN HAK PENSIUN KETENAGAKERJAAN.* VI(1), 5.
- Mohamad Risaldi Mamonto. (2017). *KAJIAN HUKUM PENETAPAN UANG PESANGON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.* *Lex et Societatis*, V(7), 50–52.
- MUTIAH. (2023). *ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PESANGON BAGI PEKERJA/BURUH DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGA.* 18.
- Nita, S., & Susilo, J. (2020). *THE ROLE OF LABOR UNIONS IN FORMING COLLECTIVE AGREEMENTS AS.* 6(2), 147–150.
- Nuroini, I. (2023). *Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Yang Memasuki Purnatugas Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.* I(1), 10–18.

- Pinontoan, E. A. E., Pongkorung, F., & Mamahit, C. E. M. (2023). *PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*. 2, 6–7.
- Rahadiyan, I. (2019). Kedudukan Bumn Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan Bumn. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4), 628. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art7>
- Sartika Zainuri. (2021). *IMPLEMENTASI HAK PEKERJA PENSUN DI PERUSAHAAN BUMN PASCA LAHIRNYA UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASER KETENAGAKERJAAN (Studi Pada PTPN III Kebun Sarang Ginting Serdang Bedagai, Sumatera Utara)* (Issue 11). Universitas Medan Area.
- Sastradinata, D. N. (2019). PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KERETA API MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PT KERETA API INDONESIA (Persero). *Jurnal Independent*, 7(2), 4. <https://doi.org/10.30736/ji.v7i2.104>
- Subagiyo, D. W. I. T., Hum, M., Wulandari, S., Kn, M., Salviana, F. M., Wulandari, S., Kn, M., & Salviana, F. M. (2019). *Hukum Perusahaan*.
- Sugiharto, A. J. (2020). *KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEBAGAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA*. 4.
- Suwarto. (n.d.). *Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia*. ILO/USA Declaration Project Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Indonesia.

Tujuan Badan Usaha Milik Negara. (n.d.). 163. [https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI KOMPLET-2_hal 163.pdf](https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20KOMPLET-2_hal_163.pdf)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. (n.d.).

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2019). *BAB II GAMBARAN UMUM PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO).*

<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27614/6>.

BAB II.pdf?sequence=6

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

C. Sumber Lainnya

<https://www.kai.id/static/konten/3bca224861ff2e7fb1c6644533c1a6d8.png>

https://www.kai.id/corporate/about_kai/ diakses pada tanggal 7 Juli 2024